

# PERBANDINGAN KERJASAMA PETANI SAYUR SPESIALISASI DAN DIVERSIFIKASI DI KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT, INDONESIA)

Almasdi<sup>1)</sup> dan Diah Permata<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi H. Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia

email: <sup>1</sup>[almasdi.stiehas@gmail.com](mailto:almasdi.stiehas@gmail.com)

<sup>2</sup>[diahpermata01@gmail.com](mailto:diahpermata01@gmail.com)

## ABSTRACT

*The choice of a specialization agricultural system and a diversified agricultural system has an impact on various things including the pattern of cooperation. This study was conducted in six vegetable commodity-producing districts in Agam District. The focus is on the comparison of cooperation patterns carried out by specialized vegetable farmers and diversified vegetable farmers. The statistical tool used is binary logistic regression with a total sample of 200 vegetable farmers. The results showed three patterns of cooperation carried out by specialty vegetable farmers and diversified vegetable farmers, namely labor cooperation, land use cooperation and financing cooperation. There are differences in the likelihood of the cooperative pattern chosen by the farmers. More labor cooperation is carried out by diversified vegetable farmers compared to specialized vegetable farmers. For land leasing cooperation, there are more specialized vegetable farmers than diversified vegetable farmers. For land cooperation with a production sharing system, more diversified vegetable farmers are doing it. In the financing collaboration, it is also evident that the differences made by each farmer. Diversified vegetable farmers choose cooperation in the form of financing from banks, while specialized vegetable farmers choose financing from investors.*

**Keywords:** *cooperation patterns; diversified vegetable farmers; vegetable specialty farmers*

## ABSTRAK

Pilihan system pertanian spesialisasi maupun system pertanian diversifikasi akan berdampak terhadap berbagai hal termasuk pola kerjasama. Studi ini dilakukan di enam kecamatan penghasil komoditi sayuran di kabupaten agam. Fokus penelitian adalah perbandingan pola kerjasama yang dilakukan oleh petani sayur spesialisasi dengan petani sayur diversifikasi. Alat statistik yang digunakan adalah regresi logistik binary dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang petani sayur. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat tiga pola kerjasama yang dilakukan oleh petani sayur spesialisasi maupun petani sayur diversifikasi yaitu kerjasama dalam tenaga kerja, kerjasama dalam penggunaan lahan serta kerjasama dalam pembiayaan. Masing-masing pola kerjasama ini terdapat perbedaan kecenderungan yang dipilih petani. Untuk kerjasama tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh petani sayur diversifikasi dibandingkan petani sayur spesialisasi. Selanjutnya untuk kerjasama terdapat perbedaan tingkat kecenderungan kerjasama, dimana petani sayur spesialisasi lebih banyak melakukan kerjasama penyewaan lahan dibandingkan petani sayur diversifikasi. Sedangkan untuk kerjasama lahan dengan system bagi hasil lebih banyak dilakukan oleh petani sayur diversifikasi. Dalam kerjasama pembiayaan juga terlihat perbedaan yang dilakukan oleh masing-masing petani. Petani sayur diversifikasi lebih memilih untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pembiayaan dari perbankan, sedangkan petani sayur spesialisasi lebih memilih pembiayaan dari pemodal.

**Kata kunci:** petani sayur diversifikasi; petani sayur spesialisasi; pola Kerjasama

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian dapat dikatakan *revive* atau hidup kembali apabila pendapatan petani telah meningkat dan kesejahteraannya membaik. Oleh karena itu, seluruh energi yang ada perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani serta sektor pertanian dan pedesaan umumnya (Arifin, 2005). Dalam usaha meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, pemerintah telah menggulirkan berbagai strategi, kebijakan dan pendekatan. Mulai dari pemberian berbagai skim-skim bantuan, baik bantuan modal usaha tani, bantuan bibit, pestisida, pelatihan dan penyuluhan maupun kebijakan harga, pengadaan infrastruktur pertanian hingga perubahan paradigma pendekatan pembangunan pertanian. Namun berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan tersebut, ternyata belum banyak berhasil memberikan dampak nyata pada perbaikan produktivitas dan peningkatan kualitas hidup petani.

Petani didefinisikan sebagai orang yang bekerja dan menggunakan secara penuh atau paruh-waktu dan terlibat dalam berbagai kegiatan serta sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian atau dianggap juga sebagai pengusaha di sektor pertanian. Jika dicermati, “*peasant*” dan “*farmer*” memiliki konotasi dan atribut yang sangat berbeda. Secara mudahnya “*peasant*” adalah gambaran dari petani yang subsisten, sedangkan “*farmer*” adalah petani modern yang berusaha tani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis. Upaya merubah petani dari karakter *peasant* menjadi *farmer* inilah hakekat dari pembangunan atau modernisasi. *Peasant* adalah suatu kelas petani yang merupakan petani kecil, penyewa (*tenant*), penyakap (*sharecropper*) dan buruh tani. Meskipun berada pada level bawah, sesungguhnya merekalah yang menggerakkan pertanian, karena merekalah yang dengan tangannya sehari-hari mengolah tanah, menanam benih, menyiram dan memanen. (Syahyuti, 2013).

Sistem pertanian yang bisa menjadi pilihan untuk dilakukan petani adalah pertanian spesialisasi yang disebut juga pertanian sejenis (*single cropping*) atau *monoculture* pada usaha tanaman. Spesialisasi produksi pertanian bermakna pengurangan berbagai macam keanekaragaman, atau peningkatan produksi dari produk-produk pilihan, yang diiringi dengan usaha untuk mempertahankan tingkat produksi yang tidak berubah (Czyzewski, 2015). Spesialisasi dapat dibedakan atas spesialisasi produksi dan spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi produksi berarti menghasilkan satu macam produk, karena pertanian beresiko tinggi maka tidak banyak petani yang melakukannya.

Dalam kaitannya dengan perdagangan global dan aspek ketahanan pangan dunia, spesialisasi mendapatkan dorongan dibandingkan diversifikasi karena adanya program komoditi pertanian yang mempertahankan spesialisasi produksi dari beberapa komoditi global seperti jagung, beras dan gandum (Pingali, 2007).

Selain sistem pertanian spesialisasi, petani juga bisa melakukan sistem pertanian diversifikasi. Nurasa (2013) melakukan penelitian tentang pendapatan petani melalui diversifikasi tanaman hortikultura di lahan sawah irigasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan petani dari hortikultura lebih tinggi dari pendapatan pertanian padi, khususnya cabe merah (6375), bawang merah (425%). Selanjutnya, tingkat pengembalian pertanian sayuran lebih tinggi daripada pertanian beras terutama sekali cabe merah (776%), bawang merah (279%), kol (200%) dan buncis (144%). Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan kebijakan harga jual petani atau kebijakan harga output karena merupakan insentif yang signifikan untuk menjadikan usahatani yang lebih menguntungkan. Fasilitas kredit maupun subsidi input sangatlah diperlukan oleh petani agar usahatannya menjadi layak dan lebih menguntungkan.

## TELAAH LITERATUR

Mu'im et.al (2014) juga melakukan penelitian tentang pengaruh diversifikasi pertanian terhadap pendapatan masyarakat di kecamatan Belawang. Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa diversifikasi pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa Belawang adalah bercocok tanam padi sekaligus tanaman perkebunan antara lain perkebunan jeruk, rambutan, nanas, mangga dan karet. Secara statistic penelitian ini memperlihatkan terdapat hasil yang signifikan dan korelasi yang cukup tinggi antara diversifikasi pertanian dengan pendapatan petani yang berarti bahwa diversifikasi pertanian cukup tinggi pengaruhnya terhadap pendapatan petani di Desa Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Perubahan lingkungan strategis erupa liberalisasi perdagangan, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen serta kelestarian lingkungan; menuntut adanya perubahan cara beroperasinya kelembagaan kerjasama usaha agribisnis dan hortikultura (Saptana, et.al, 2006). Pemerintah hanya sedikit memfasilitasi antara lain dengan menyediakan sarana transaksi berupa pembangunan sub terminal agribisnis (STA). Namun karena tugasnya belum seefektif dan seefisien yang diharapkan, mengakibatkan harga yang diterima petani masih rendah. Salah satu alternatif pemecahan masalah pemasaran adalah dikembangkannya kelembagaan kerjasama antara petani dan industry pengolahan (Supriyati dan Elizabeth, 2010).

Secara umum kerjasama mempunyai beberapa pengertian menurut Supriyati dan Elizabeth : (a) Kerjasama adalah jalinan kerjasama antara berbagai pelaku agribisnis, mulai dari tingkat produksi sampai ke tingkat pemasaran; (b) Menurut Undang-Undang No.9 tahun 1995, kerjasama adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 tahun 1997 tentang kerjasama, secara prinsip kerjasama usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi. Peraturan tersebut ditindaklanjuti melalui SK Mentan No.940/Kpts/OT.210/1997 tentang Pedoman Kerjasama Usaha Pertanian, yang mengemukakan tentang pola-pola kerjasama usaha yang dapat dilaksanakan, antara lain pola: inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dalam bentuk-bentuk lain, misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).

Kerjasama yang dibangun petani dengan pihak terahit diharapkan berdampak terhadap pendapatan yang diterima petani. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nengah Suriati, et al., 2015, memperlihatkan bahwa kerjasama yang dibangun oleh petani *Heliconia* dengan perusahaan Sekar Bumi Farm menggunakan pola plasma. Sekar Bumi Farm sebagai industry melakukan pendekatan kepada para petani dan selanjutnya dari kesepakatan yang dibuat melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuntungan petani meningkat 0,98 hingga 1,34 persen setelah bergabung dalam kemitraan.

Kabupaten Agam yang merupakan daerah subur mempunyai luas lahan panen tanaman hortikultura yang dilaksanakan petani dan kelompok tani seluas 11.123 Ha atau 75,2 persen diantaranya ditanami Sayuran, seperti antara lain, Bawang sebanyak 586 ha, bawang merah sebanyak 111 ha, bayam sebanyak 90 ha, buncis 1.170 ha, cabe besar sebanyak 2.290 ha, cabe rawit 628 ha, jamur sebanyak 1.014 M<sup>2</sup> kemudian kacang panjang sebanyak 209 ha, kangkung sebanyak 147 ha, kembang kol 402 ha, kentang 127 ha, wortel 395 ha, terung 974 ha, tomat 522 ha, swai 368 ha dan kubis 351 ha. Dengan demikian 75,2 persen luas lahan Hortikultura yang ada di Kabupaten Agam ditanami sayuran dan buah-buahan dengan jumlah produksi keseluruhan 377.238,35 kuintal. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Agam terus mendorong petani mengembangkan budidaya tanaman Hortikultura, karena permintaan pasar cenderung meningkat dan cukup menjanjikan pendapatan ekonomi keluarga.

Salah satu kendala dalam usahatani yang banyak dihadapi petani, apalagi petani kecil adalah ketersediaan modal baik itu modal berupa biaya (dana) produksi maupun modal dalam bentuk ketersediaan lahan. Mardikanto (1983), menyatakan bahwa modal adalah faktor penunjang utama dalam kegiatan berusahatani. Sehingga tidak jarang dan bahkan sudah merupakan sebuah fenomena yang sering tampak dipermukaan bahwa ada petani yang memiliki lahan dan tenaga, tetapi tidak mempunyai modal (dana) untuk membiayai kegiatan usahatannya, atau seorang petani mempunyai tenaga dan dana untuk membiayai kegiatan usahatani, tetapi tidak mempunyai lahan yang cukup atau tidak punya lahan pertanian sama sekali, dan bahkan ada petani yang hanya memiliki tenaga saja, namun tidak mempunyai lahan dan modal untuk membiayai kegiatan usahatani, sehingga mereka semata menjadi buruh tani dengan hanya menerima upah saja atau bagi hasil dari pihak yang memperkerjakannya.

Pihak ketiga yang biasanya yang menjadi sumber pendanaan biaya operasional produksi ini adalah pedagang pengumpul ataupun tengkulak. Pendanaan tersebut dapat saja berupa pinjaman (kredit) maupun pengadaan benih (bibit) maupun pestisida, dan pupuk, dengan kompensasi pembagian hasil atau membayar hutang dengan tingkat bunga tertentu. Inilah salah satu dilema yang sering dan pada umumnya dihadapi petani kecil di pedesaan.

Demikian juga halnya dengan lahan, dalam hal ini ditemui beberapa petani yang memiliki lahan yang sangat kecil, sekitar pekarangan rumah, tidak cukup memadai sebagai lahan pertanian yang dapat memberikan keuntungan, disamping itu ada petani yang tidak memiliki lahan semasekali, sehingga adakalanya mereka ini menyewa lahan pada masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas atau lahan tidur yang belum atau tidak dimanfaatkan pemiliknya atau berkerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan pemilik lahan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan pengisian angket atau kuisiner yang diberikan pada petani sampel. Populasi penelitian ini adalah rumah tangga petani atau petani yang mengusahakan tanaman sayuran di beberapa Kecamatan dilingkungan Kabupaten Agam. Berdasarkan Sensus Pertanian (ST2013), Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 Kecamatan dengan jumlah penduduk keseluruhan sebesar 472.995 jiwa, sebanyak 154.481 jiwa atau (32,6 %) merupakan penduduk daerah kecamatan penelitian. Dan 102.315 jiwa atau (66,23 %) dari jumlah penduduk tersebut adalah merupakan rumah tangga petani, sedangkan jumlah petani sayur dari jumlah petani keseluruhan pada daerah enam kecamatan penelitian ini adalah sebanyak **73.574** petani atau (79,9 %).

Dengan menggunakan formula sederhana Slovin (Umar,2005), maka dengan populasi petani sayuran sebesar **73.574** tersebut akan diperoleh jumlah sampel sebanyak **99,88** atau dibulatkan menjadi 100 orang petani responden. Untuk lebih meyakinkan terhadap hasil yang akan diperoleh pada penelitian ini, maka ditetapkan jumlah responden sebanyak **200 orang** responden dengan asumsi bahwa hasil yang akan diperoleh diharapkan akan lebih baik.

Regresi logistik binari dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya pada pembentukan model penelitian, maka persamaan regresi binary logistiknya dapat ditulis sebagai berikut ini adalah:

$$D = \alpha + \beta_{1n}X_{1n} + \beta_{2n}X_{2n} + \beta_{3n}X_{3n} + \beta_{4n}X_{4n} + \dots + \beta_nX_n$$

$$D = \log p = \left( \frac{p}{1-p} \right)$$

Keterangan:

Y = Pilihan petani untuk pertanian Diversifikasi atau pertanian Spesialisasi  
(Pertanian Diversifikasi=0, Pertanian Spesialisasi =1)

- X1 = Umur
- X2 = Pendidikan
- X3 = Jumlah Tanggungan
- X4 = Luas Lahan
- X5 = Pengalaman Petani
- X6 = Kerjasama Usaha
- X7 = Pasar
- X8 = Kewirausahaan

Uji Ekspektasi (B) ditujukan untuk mengetahui seberapa baik kesesuaian diantara frekuensi harapan yang didasarkan pada yang akan di hipotesiskan atau juga menguji perbedaan antara dua kelompok pada data dua kategori untuk menguji signifikan asosiasi dua kelompok pada dua kategori tersebut. Dengan kata lain, ujian ini dapat digunakan untuk melihat variabel yang paling dominan mempengaruhi pilihan petani, dimana nilai Exp (B) yang paling besar merupakan variabel yang paling dominan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan regression modeling dengan Regresi logistik binary sebanyak 3 kali pengujian diperoleh variabel kerjasama dengan nilai koefisien terbesar yaitu 0.382. Selanjutnya dilakukan Uji Ekspektasi B untuk melihat variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen dari keenam variabel independen yang diprediksi berpengaruh signifikan terhadap pilihan sistem spesialisasi oleh petani. Hasil uji ini juga memperlihatkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh paling besar (dominan) terhadap penerapan sistem spesialisasi tanaman sayuran oleh petani tersebut adalah variabel **Kerjasama Modal Usaha**. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai ekstektasi B atau nilai Exp (B) adalah **1,418** merupakan nilai terbesar dari semua variabel yang diamati pada model regresi tersebut, sebagaimana yang tergambar pada tabel *Variable in the Equation* berikut:

**Tabel 1**  
**Nilai Koefisien Regresi Tahap IV**

Variabel	B	Wald	Sig.	Exp (B)
Jumlah Tanggungan (X3)	-0,226	6,072	0,014	0,797
Pengalaman Petani (X5)	0,076	5,811	0,016	1,079
Kerjasama (X6)	0,349	5,266	0,022	<b>1,418</b>
Pasar (X7)	0,102	4,292	0,038	1,108
Kewirausahaan (X8)	0,026	5,974	0,015	1,026
Konstanta	-4,992	10,190	0,001	0,007

Sumber: hasil olahan SPSS pada data primer

Angka ini menunjukkan bahwa variabel **Kerjasama Modal Usaha** mempunyai pengaruh yang paling besar sebagai faktor penguat penerapansistem budidaya spesialisasi oleh petani. Dengan kata lain, bahwa variabel kerjasama ini memberikan kontribusi yang paling dominan memberikan penguatan dalam penerapan sistem budidaya spesialisasi dibandingkan keempat variabel lainnya, yaitu variabel jumlah tanggungan, pengalaman usahatani, pasar dan kewirausahaan.

Gambaran lengkap bentuk kerjasama modal ini di enam daerah penelitian pada enam kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Karakteristik Kerjasama Modal Usaha**  
**Menurut Daerah Penelitian**

No	Daerah Penelitian	Bentuk Kerjasama Modal Usahatani				Total
		Tenaga Kerja	Lahan	Pembiayaan	Tidak bermitra	
01	Banuhampu	3	15	12	7	37
02	Sungai Puar	8	12	12	14	46
03	IV. Koto	5	11	8	14	38
04	Candung	4	13	7	4	28
05	Tilatang Kamang	5	9	6	2	22
06	Baso	7	8	8	6	29
	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>200</b>
	Persentase	16,0	34,0	26,5	23,5	100

Sumber: diolah dari data primer

Pada Tabel diatas terlihat bahwa di enam kecamatan tempat penelitian ini ditemui fakta, bahwa hanya **47 responden (23,5 persen)** petani sayur di daerah ini yang benar-benar mandiri dalam kegiatan usahatani. Artinya tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik tenaga, lahan maupun dana untuk membiayai produksi, semua faktor produksi utama tersebut dimiliki oleh petani itu sendiri.

Sedangkan sebagian besarnya dari petani sayuran ini, yaitu **68 responden (34 persen)** menggunakan lahan milik orang lain, baik yang disewa atau bersifat bagi hasil. Artinya, petani tersebut hanya memiliki dana dan tenaga, walaupun ada memiliki lahan tapi sangat kecil, berupa pekarangan rumah. Disisi lain ada **53 responden (26,6 persen)** hanya memiliki lahan dan tenaga, tetapi kurang atau tidak mempunyai cukup dana untuk pembiayaan kegiatan pertaniannya. Sehingga untuk pembiayaan kegiatan usahatani, petani meninjam dana dari pihak ketiga baik kepada rentenir, maupun peminjaman berupa kredit pada lembaga BPR ataupun menerima dalam bentuk dana atau penyediaan bibit, pupuk, dan pestisida pembasmi hama dari pihak lain (pedagang pengumpul atau pedagang grosir) dengan kompensasi bagi hasil pada batasan-batasan tertentu. Dan sisanya **32 responde (16 persen)** merupakan buruh tani, dimana petani tersebut tidak memiliki baik lahan maupun biaya produksi, keduanya unsur tersebut berasal dari pihak lain yang memiliki lahan dan modal.

Namun demikian, data tersebut memberikan gambaran bahwa betapa masih sangat rendahnya tingkat kesejahteraan petani, hanya 23 persen petani yang memiliki sumber-sumber produksi secara mandiri. Fenomena lain yang menarik bahwa dalam Kerjasama modal usahatani ini tidak jarang disamping adanya komitmen bagi hasil atau pengembalian pinjaman, disamping itu kebanyakan juga pihak yang dominan dalam modal usaha ini turut dalam menentukan jenis tanaman sayuran yang akan di budidayakan petani

Tabel berikut ini memperlihatkan perbandingan pola kerjasama antara petani sayur spesialisasi dengan petani sayur diversifikasi di Kabupaten Agam.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Pola kerjasama Petani Sayur**  
**Spesialisasi dengan Diversifikasi**

No	Sistem Budidaya	Kerjasama Tenaga Kerja	Kerjasama Lahan		Kerjasama Pembiayaan		Tidak Bermitra	Total
			Sewa	Bagi Hasil	Dibayai	Pinjaman		
01	Diversifikasi	25	12	27	8	19	23	114
	Persentase	12,5	6,0	13,5	4,0	9,5	11,5	57,0
02	Spesialisasi	7	19	10	20	6	24	86
	Persentase	3,5	9,5	5,0	10,0	3,0	12,0	43,0
03	Total	32	31	37	28	25	47	200
	Jumlah Keseluruhan	32	68		53		47	200
	Persentase	16,0	34,0		26,5		23,5	100

Sumber: diolah dari data primer

Data pada Tabel diatas, memperlihatkan beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petani sayur spesialisasi dan petani sayur diversifikasi di Kabupaten Agam. Kerjasama dalam tenaga kerja dilakukan oleh petani sayur spesialisasi dan petani sayur diversifikasi sebesar 16%. Kerjasama penggunaan lahan yang terdiri dari penggunaan lahan dalam bentuk sewa dan bagi hasil secara total adalah 34%. Bentuk kerjasama lain yang dilakukan adalah dalam hal pembiayaan sebesar 26,5% dilakukan oleh petani.

Dalam hal kerjasama tenaga kerja, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kerjasama tenaga kerja petani sayur diversifikasi lebih tinggi yaitu sebesar 12,5% dibandingkan dari petani sayur spesialisasi sebesar 3,5%.

Untuk kerjasama lahan, terlihat perbedaan tingkat kerjasama yang dilakukan oleh petani sayur spesialisasi dan petani sayur diversifikasi. Untuk kerjasama penyewaan lahan kecenderungan petani spesialisasi lebih tinggi yaitu sebesar 9,5% sedangkan petani sayur diversifikasi sebesar 6%. Hal ini berbeda pada kerjasama bagi hasil, dimana petani sayur diversifikasi lebih tinggi tingkat kerjasamanya yaitu sebesar 13,5% dibandingkan petani sayur spesialisasi yaitu sebesar 5%.

Begitu juga dalam hal kerjasama modal usaha dari aspek pembiayaan, terlihat perbedaan tingkat kerjasama yang dilakukan oleh petani sayur spesialisasi dengan petani sayur diversifikasi. Kerjasama yang dilakukan petani disini adalah pembiayaan dari pemodal dan dalam bentuk pembiayaan tersebut berasal dari pinjaman baik pinjaman dari pihak Bank (BPR atau BRI) atau pinjaman individu.

Kerjasama pembiayaan dari pemodal lebih tinggi dilakukan oleh petani sayur spesialisasi yaitu sebesar 10% dibandingkan petani sayur diversifikasi sebesar 4%. Sedangkan untuk kerjasama dalam bentuk pembiayaan dari bank terlihat bahwa petani diversifikasi lebih tinggi yaitu sebesar 9,5% dibandingkan petani sayur spesialisasi sebesar 3%.

Dari aspek pembiayaan ini, bentuk sistem budidaya tanaman sayur sebagian besar pembiayaan yang berasal dalam bentuk pinjaman petaninya lebih memilih menerapkan sistem Diversifikasi, karena mempertimbangkan resiko besar yang harus dihadapi, yaitu mengembalikan pinjaman dan memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan pembiayaan yang berasal dari pedagang atau pengumpul bentuk sistem budidayanya adalah sistem spesialisasi, karena resiko berada pada pemodal, namun pemodal sudah mempertimbangkan aspek ekonomis dan bisnis. Sisanya, sebesar 16,0 persen kerjasama modal usaha dilakukan dalam bentuk penggunaan tenaga kerja (tani buruh) yang sebagian besar menerapkan sistem budidaya diversifikasi, karena petani buruh tidak memiliki bargaining position untuk menentukan sikap

apapun selain daripada menerima upah. Terakhir bagi petani yang tidak melakukan kerjasama (petani mandiri), pilihan dalam penerapan sistem budidaya seimbang, ada yang menerapkan sistem diversifikasi ada yang menerapkan sistem diversifikasi. Baik karena pertimbangan resiko, ekonomis dan aspek budidaya.

Secara statistik kerjasama modal usaha tani juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan dan bahkan kerjasama modal usaha ini merupakan variabel yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap penggunaan sistem budidaya spesialisasi tanaman sayur. Kerjasama modal usaha ini dapat dilakukan petani dengan beberapa pihak, antara lain dilakukan dengan sesama petani, dengan pihak Bank, maupun dengan pihak pedagang pengumpul ataupun rentenir sekalipun.

Dalam penelitian ini bentuk kerjasama modal usahatani tersebut, fakta yang ditemui di lapangan, terdapat 4 (empat) macam bentuk atau kondisi kerjasama modal usaha, yaitu: *pertama*, kerjasama dalam bentuk **pengadaan lahan**; yaitu adanya petani yang tidak memiliki lahan, yang hanya mempunyai modal dan tenaga, pengadaan lahan dilakukan dengan menyewa lahan, atau pemakaian lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil; *kedua*, kerjasama dalam bentuk **pengadaan modal** (dana) untuk pembiayaan operasional kegiatan produksi atau pengelolaan usahatani, modal disini dapat saja dalam bentuk pendanaan atau **pembiayaan** operasional yang ditanggung langsung oleh pihak lain, kebanyakan pedagang pengumpul dengan kompensasi bagi hasil, pembiayaan ini biasanya dalam bentuk pengadaan langsung bibit, pestisida, dan pupuk, atau dapat juga dalam bentuk (kredit) **peminjaman** dana dari lembaga perbankan, misalnya BPR atau BRI dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), ada juga dalam bentuk **hutang** dengan pihak rentenir, dengan tingkat suku bunga tertentu; *ketiga*, kerjasama dalam bentuk **tenaga kerja (pengelola)**, yaitu petani responden yang hanya memiliki tenaga dan pengalaman usahatani, namun tidak mempunyai lahan dan modal (dana), biasanya petani ini pada umumnya hanya menerima upah yang dikenal juga dengan istilah **buruh tani**; *terakhir*, petani yang tidak melakukan kerjasama, atau disebut sebagai petani mandiri, yaitu petani yang memiliki sendiri baik lahan, modal dan maupun tenaga pengelolaan.

Lebih lanjut hubungan kerjasama modal usahatani ini dapat dijelaskan bahwa dalam setiap pengelolaan usahatani selalu ada kerjasama pada prinsipnya tujuan kerjasama yang dilakukan petani dengan berbagai pihak adalah untuk meringankan beban dan mengatasi kekurangan serta saling menguntungkan. Namun semua pihak berfikir dan saling memiliki keyakinan bahwa kerjasama ini juga memiliki resiko, yaitu resiko gagal panen atau resiko rugi dari penjualan hasil panen.

Penelitian ini juga memperlihatkan adanya kerjasama antara petani sayur dengan pedagang pengumpul. Merupakan hal umum pedagang pengumpul memberikan pembayaran di depan, namun tanpa bunga. Hal ini ditujukan untuk memudahkan koordinasi antara pedagang pemodal dengan petani.

Namun, ikatan yang berupa modal awal yang diberikan kepada petani tidak menjadikan pasar monopoli atau monopsoni, meskipun petani terikat untuk menjual hasil tanamannya pada pedagang tertentu, tetapi dia dengan mudah bisa pindah ke pedagang pemodal lain pada musim berikutnya.

Disamping itu, terutama bagi petani yang menyewa lahan karena tidak memiliki modal dan lahan, maka petani tersebut akan menanggung berbagai kewajiban, antara lain membayar sewa lahan, membayar kredit, jika meminjam dana Bank, atau membayar hutang pada Rentenir. Oleh karena itu, petani penerima manfaat kerjasama ini, biasanya dalam menentukan jenis komoditas akan sangat selektif, misalnya dengan mempertimbangkan aspek harga jual komoditi, masa tanam, peluang pasar, agar tidak mengalami kerugian.

Kecuali bagi petani buruh (pekerja saja) yang hanya menerima upah, biasanya setiap akhir panen, akan menerima upah sebesar 30 persen dari nilai hasil panen yang diterima dalam bentuk uang bukan dalam bentuk hasil panen (komoditas).

Demikian juga bagi petani yang memiliki lahan dan modal, maka jenis tanaman sayuran dan sistem budidayanya lebih banyak ditentukan oleh petani itu sendiri, sesuai dengan pendapat Mosher (1987) bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, petani selain sebagai pekerja juga harus mampu bertindak sebagai manager. Sebagai manager, petani akan berusaha mengelola usahatannya untuk mencapai pendapatan yang maksimal. Petani akan selalu membandingkan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen dengan biaya yang dikeluarkan.

Sedangkan bagi petani yang pembiayaan usahatannya berasal dari pedagang pengumpul, maka jenis tanaman sayuran dan sistem budidayanya lebih banyak ditentukan oleh penyandang dana (pedagang pengumpul) tersebut, apalagi bagi petani yang modal, lahan dan tenaga merupakan milik sendiri, sudah tentu jenis produk dan sistem tanam sepenuhnya ditentukan sendiri.

Sebaliknya bentuk lain dari masalah bagi petani yang menyewa lahan, kadangkala bila petani tersebut berhasil atau memperoleh keberuntungan dari usahatannya pada lahan yang disewa tersebut, tidak jarang pula untuk musim tanam berikutnya sewa lahan menjadi naik dan tidak jarang pula lahan tersebut tidak disewakan lagi oleh pemiliknya, karena pemilik ingin melakukan dan memanfaatkan sendiri lahan tersebut.

Dalam menentukan besarnya harga sewa suatu lahan, biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan, ditentukan oleh luas lahan. Biasanya luas lahan 0,25 hektar, besar sewanya dikonversi dalam bentuk nilai padi, misalnya seharga 25 karung padi @ Rp.200.000,- berarti sewa lahan 0,25 Ha tersebut Rp. 5 juta per tahun. Ada juga juga sewa lahan tersebut dinilai dengan luas lahan dikalikan dengan harga komoditi yang dihasilkan, tetapi masih ada tawar menawar antara pemilik dengan penyewa, kecuali lahan sawah untuk tanaman padi.

Menghadapi harga sewa lahan ini, biasanya petani sangat teliti dalam menentukan sikap, terutama dalam menentukan jenis komoditas sayuran. Petani lebih memperhatikan pada jenis komoditas yang memiliki harga jual yang baik juga sistem budidayanya, agar dapat memperoleh keuntungan. Dan tidak jauh beda dengan lahan yang digunakan bersifat bagi hasil jenis dan sistem tanam ditentukan berdua atau yang membiayai operasional usahatani.

Bagi petani yang modal usahatannya berasal dari pinjaman Bank dalam bentuk KUR tersebut, petani juga harus mempertimbangkan tingkat suku bunga sebesar 6 % per tahun. Namun kadang-kadang petani tidak cukup sabar dalam menjalani proses dan persyaratan administrasi, sehingga tidak jarang pula petani menempuh jalan pintas dengan meminjam dana pada rentenir atau tengkulak, dengan resiko tingkat bunga yang besar, kecuali bermitra modal dengan inang2 (toke sayur) biasanya pembagian keuntungan 60 % bagi pengelola, 40 % bagi pemodal, atau ada juga bagi hasil dengan porsi 70:30 persen dibayar dalam bentuk produk, serta jenis produk ditentukan oleh inang-inang tersebut. Dengan kedua cara sumber dana terakhir ini kelebihanannya adalah petani mudah dalam hal proses dan persyaratannya serta cepat dalam pencairannya.

Bagi petani yang mandiri, pada umumnya luas lahannya juga tidak terlalu luas, berkisar antara 0,25 - 0,5 hektar. Penentuan jenis komoditas yang ditanam dan sistem budidaya yang diterapkan ditentukan sendiri dengan pertimbangan adalah yang paling menguntungkan. Demikian juga dalam pemasaran hasil panen dapat langsung akses ke pasar atau konsumen, tanpa perantara, sedangkan keuntungan dapat diperoleh 100 persen.

## **SIMPULAN**

1. Terdapat tiga pola kerjasama yang dilakukan oleh petani sayur spesialisasi maupun petani sayur diversifikasi yaitu kerjasama dalam tenaga kerja, kerjasama dalam penggunaan lahan serta kerjasama dalam pembiayaan.

2. Pada masing-masing pola kerjasama ini terdapat perbedaan kecenderungan yang dipilih petani. Untuk kerjasama tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh petani sayur diversifikasi dibandingkan petani sayur spesialisasi.
3. Selanjutnya untuk kerjasama terdapat perbedaan tingkat kecenderungan kerjasama, dimana petani sayur spesialisasi lebih banyak melakukan kerjasama penyewaan lahan dibandingkan petani sayur diversifikasi.
4. Untuk kerjasama lahan dengan system bagi hasil lebih banyak dilakukan oleh petani sayur diversifikasi. Dalam kerjasama pembiayaan juga terlihat perbedaan yang dilakukan oleh masing-masing petani. Petani sayur diversifikasi lebih memilih untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pembiayaan dari perbangan, sedangkan petani sayur spesialisasi lebih memilih pembiayaan dari pemodal.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip INI, serta menerbitkan tulisan saya ini dalam jurnal LASER.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bustanul Arifin, Pembangunan Pertanian, Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- Czyżewski, Andrzej, and Katarzyna Smędzik-Ambroży. "Specialization and diversification of agricultural production in the light of sustainable development." *Journal of International Studies Vol 8.2* (2015): 63-73.
- Mu'min, Et. Al. 2014. Pengaruh Diversifikasi Pertanian Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Belawang Kecamatan Belawang. <https://Ppjp.Unlam.Ac.Id/Journals/Index.Php>
- Ni Nengah Suriati, Ratna Komala Dewi, Dan A.A.A Wulandira Sawitri Djelantik, Pola Kerjasama Antara Petani *Heliconia* Dengan Sekar Bumi *Farm* Di Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata Issn: 2301-6523 Vol.4, No.4, Oktober 2015.
- Nurasa, Tjetjep. "Meningkatkan Pendapatan Petani Melalui Difersivikasi Tanaman Hortikultura Di Lahan Sawah Irigasi." *Jurnal Sepa (Social Economic And Agribusiness Journal)* 10.1 (2017): 71-87.
- Syahyuti, Pemahaman terhadap Petani Kecil sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/63126-ID-pemahaman-terhadap-petani-kecil-sebagai.pdf>
- Pingali, P. L. 2007. *Agricultural Mechanization: Adoption Pattern and Economic Impact*. Pages 2779-2805 in R. Evenson and P. Pingali, Editors. Handbook of Agricultural Economics, Volume 3. Elsevier Science, Amsterdam, The Netherlands. [http://dx.doi.org/10.1016/S1574-0072\(06\)03054-4](http://dx.doi.org/10.1016/S1574-0072(06)03054-4)
- Saptana, Saptana, Sunarsih Sunarsih, and Kurnia Suci Indraningsih. "Mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui pengembangan kerjasama usaha hortikultura." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 24. No. 1. Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies, 2006.
- Supriyati dan Roosganda Elizabeth, Pengembangan Usaha Kerjasama yang Saling Menguntungkan, : Kasus antara PT.HEINZ ABC Indonesia, dengan Petani Cabai Merah di Jawa Tengah, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010.